

SINOPSIS

Masalah kemiskinan merupakan fenomena sosial kemasyarakatan yang terdapat diberbagai daerah Provinsi, Kabupaten/Kota bahkan Desa di Indonesia. Oleh karena itu berbagai upaya penanggulangannya telah dilakukan Pemerintah melalui pelaksanaan berbagai kebijakan pemberdayaan masyarakat yang langsung menyentuh kebutuhan hidup masyarakat miskin.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dan penjelasan tentang bagaimana pelaksanaan serta peran PNPM-MPd dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Desa Dharma Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, serta faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui PNPM-MPd tersebut,

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang objek yang diteliti mengenai pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat terhadap pembangunan sarana prasarana pengaspalan jalan di Dusun Daman Desa Dharma Tanjung Kecamatan Camplong.. Selanjutnya data diperoleh melalui dokumentasi dan wawancara secara langsung dengan UPK, Fasilitator, TPK, dan Tokoh Masyarakat. Data kemudian diolah secara analisis kualitatif dan hasilnya disajikan dan digambarkan secara jelas mengenai bagaimana implementasi program PNPM-MPd ini yang diolah berdasarkan fakta-fakta dilapangan.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PNPM-MPd terkait pengaspalan jalan di Desa Dharma Tanjung Kecamatan Camplong sudah menunjukkan kinerja yang baik, hal tersebut dapat di lihat dari pengukuran parameter implementasi yang meliputi Bantuan Langsung Masyarakat, Dana Operasional Kinerja dan pendampingan masyarakat yang sudah sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB), faktor yang mempengaruhi implementasi yaitu masalah sosialisasi yang masih terbatas musyawarah desa tanpa melibatkan media cetak dan elektronik perlu perbaikan, secara umum manajemen organisasi internal seperti komunikasi, disposisi, sumber daya dan struktur organisasi sudah cukup baik, hal ini terlihat jarang terjadi tumpang tindih tugas satu dengan yang lainnya. Masing-masing petugas telah mengetahui fungsi dan perannya masing-masing. Dan juga masyarakat yang aktif terlibat dalam proses implementasi kebijakan PNPM-MPd ini, juga menjadi faktor pendukung implementasi kebijakan berjalan dengan baik.

Oleh karena itu saran atau rekomendasi yang penulis berikan untuk masalah tersebut adalah perlu adanya sosialisasi secara berkelanjutan dan berkala serta dilakukan secara lebih massif. Sosialisasi tersebut bisa dilakukan dengan cara memanfaatkan media cetak dan elektronik yang sudah. Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Tim Pengelola Kegiatan (TPK), dan para kader-kader desa yang direkrut agar lebih ditingkatkan kemampuannya melalui pendidikan dan pelatihan-pelatihan, mengingatkan para pelaku PNPM-MPd ini secara langsung menjadi ujung tombak program dan juga perlu pengawasan yang lebih baik oleh masyarakat dan Pemda karena program PNPM Mandiri ini rentan akan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).